**BAB II**

**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

* 1. **ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**

Pembentukan Kabupaten Tana Toraja melalui proses sejarah yang cukup panjang. Pada waktu awal daerah ini dikenal dengan “Tondok Lepongan Bulan Tanah Matari’ Allo“. Pada jaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1926, Tanah Toraja dijadikan Onder Afdeeling Makale – Rantepao di bawah Selfbestur Luwu yang terdiri dari 32 Lanschap dan 410 Kampung. Setahun setelah Indonesia merdeka, Onder Afdeeling Makale – Rantepao dipisahkan dari daerah Swapraja Luwu berdasarkan Besluit Lannshap Nomor 105 tanggal 8 Oktober 1946 menjadi swapraja yang berdiri sendiri di bawah pemerintahan “ Tongkonan Ada’ “. Pada tanggal 31 Agustus 1957 status Swapraja berubah menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja dengan ibukotanya Makale sesuai Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja berubah menjadi Kabupaten Tana Toraja.

Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 sekitar 2.054,30 km2 atau 4,51 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan terletak pada koordinat 1190 - 1200 Bujur Timur dan 2,400 – 3,230 Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi Barat

Sebelah Selatan : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang

Sebelah Timur : Kabupaten Luwu

Sebelah Barat : Propinsi Sulawesi Barat

Wilayah administratif pemerintahan terdiri atas 19 Kecamatan, 112 Lembang dan 47 Kelurahan dengan jumlah penduduk berdasarkan Survey Sosial Ekonomi nasional pada tahun 2010 sebesar 221.081 jiwa yang terdiri atas 108.609 jiwa penduduk perempuan dan 112.472 jiwa penduduk laki-laki yang berarti mamiliki sex ratio 103,56 persen, pertumbuhan penduduk 8,84 persen serta kepadatan penduduk mencapai 108 jiwa/km2.

Secara umum keadaan topografinya bergunung-gunung dan berbukit-bukit, berada pada ketinggian < 300 m – > 2.500 m diatas permukaan laut. Luas wilayah menurut tinggi rendahnya dari permukaan laut yaitu ketinggian kurang dari 300 m sekitar 2,44 persen (5.063,79 Ha); Ketinggian antara 300 m – 500 m sekitar 5,69 persen (11.808,06 Ha); Ketinggian antara 500 m – 1.000 m sekitar 35,12 persen (72.888,06 Ha); Ketinggian antara 1,000 m – 1.500 m sekitar 33,41 persen (69.342,94 Ha); Ketinggian antara 1.500 m – 2.000 m sekitar 14,28 persen (29.644,43 Ha); Ketinggian antara 2.000 m – 2.500 m sekitar 8,46 persen (17.565,65 Ha); dan Ketinggian di atas 2.500 m sekitar 0,60 persen (1.237,14 Ha).

Kabupaten Tana Toraja termasuk beriklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar 150-280 Celcius, dengan kelembaban udara antara 82 persen - 86 persen. Curah hujan rata-rata berkisar antara 1.500 mm – 3.500 mm pertahun. Bulan basah umumnya terjadi pada bulan Maret, April dan Mei serta yang terendah pada bulan Agustus, September dan Oktober.

Di Kabupaten Tana Toraja terdapat beberapa gunung yang menjadi hulu sungai yang bermuara di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, antara lain Sungai Sa’dan yang bermuara di Kabupaten Pinrang, Sungai To’nangka yang bermuara di Kabupaten Luwu dan beberapa sungai lainnya.

* 1. **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di segala bidang kehidupan masyarakat namun harus diakui bahwa disamping kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan dan masalah yang belum sepenuhnya terecahkan dan atau teratasi yang perlu dilanjutkan upaya penanganannya dalam pembangunan yang akan datang.

* + 1. **Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama**

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai subjek sekaligus objek pembangunan yang mencakup seluruh hidup manusia sejak masih dalam kandungan sampai dengan akhir hidupnya.Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 sebesar 71,84. Indeks Pembangunan Manusia tahun 2010 tersebut mencakup nilai Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 74,17, Angka Melek Aksara sebesar 86,28 dan Pendapatan Perkapita yang dihitung berdasarkan Paritas Daya Beli sebesar Rp. 614.990,-.

1. Bidang Kependudukan, aspek jumlah dan komposisi penduduk terkait erat dengan kondisi kehidupan masyarakat. Penduduk Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2010 sebesar 221.081 jiwa yang terdiri dari 108.609 jiwa perempuan dan 112.472 jiwa laki-laki dengan sex ratio 103,56 serta kepadatan penduduk rata-rata sebesar 108 jiwa/km2. Kecamatan Makale merupakan kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai 846 jiwa/km2,sedangkan Kecamatan Bonggakaradeng dan Kecamatan Simbuang merupakan kecamatan terendah kepadatannya yakni hanya mencapai 32 jiwa/km2. Struktur umur penduduk di Kabupaten Tana Toraja adalah usia 0 – 14 tahun sekitar 35,96 persen; usia 15 – 24 tahun sekitar 15,51 persen; usia 25 – 64 tahun 42,05 persen dan usia 65 tahun keatas sekitar 6,46 persen.
2. Bidang Kesehatan, status kesehatan masyarakat masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH), menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya angka status gizi di Kabupaten Tana Toraja (menurunnya angka kurang gizi di Kabupaten Tana Toraja), menurunnya angka kematian ibu melahirkan. Angka Harapan Hidup Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 sebesar 74,17 tahun. Angka kematian bayi sebesar 46 per 1000 kelahiran hidup, masih lebih tinggi dibandingkan angka Sulawesi Selatan sebasar 44 per 1000 kelahiran hidup. Status gizi buruk di Kabupaten Tana Toraja sebesar 21,00 persen, serta angka kematian ibu bersalin sebesar 193 per 100.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan laporan kesakitan, pola penyakit masyarakat Tana Toraja pada tahun 2010 didominasi oleh penyakit-penyakit infeksi antara lain ISPA, Batuk, Dermatitis, Demam dan lain-lain serta di sisi lain, penyakit-penyakit degeneratif misalnya hipertensi, penyakit pada syaraf otot dan kecelakaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga selain menangani penyakit infeksi juga penyakit non infeksi sehingga terjadi beban ganda penyakit. Selain itu, masih didapatinya kejadian luar biasa (KLB) untuk penyakit Tetanus Neonatorum dan Campak. Menurut data tahun 2010, jumlah kasus 5 (lima) penyakit terbesar di Kabupaten Tana Toraja adalah : ISPA 74.438 kasus; Batuk 24.813 kasus; Dermatitis 20.677 kasus; Demam 18.609 kasus dan Gasrtitis 18.604 kasus.

Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas minimal 1 (satu) disetiap kecamatan dan ditunjang oleh Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, namun peralatan dan jangkauan pelayanan masih rendah. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat terutama didaerah pedesaan dan terpencil. Selain itu dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan lembang/kelurahan maka diperlukan penambahan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta Polindes disertai dengan pengadaan sarana yang memenuhi standar terutama pada wilayah terpencil dan terisolir. Selama ini, untuk menjangkau daerah terpencil hanya dapat dilakukan kunjungan empat kali dalam setahun (setiap triwulan).

Sarana dan prasarana kesehatan tahun 2010 di Kabupaten Tana Toraja masing-masing Rumah Sakit Umum Pemerintah 1 buah, Rumah Sakit Umum Swasta 1 buah, Puskesmas 20 buah, Puskesmas Pembantu 30 buah, Posyandu 252 buah dan Polindes 44 buah. Selain itu di Kabupaten Tana Toraja terdapat 38 orang Dokter, 214 orang perawat, 63 orang Bidan. Ratio puskesmas terhadap penduduk 1/11.055 jiwa, ratio dokter terhadap penduduk sebesar 17/100.000 jiwa, ratio bidan terhadap penduduk sebesar 29/100.000 jiwa, ratio perawat terhadap penduduk sebesar 97/100.000 jiwa.

Selanjutnya pelayanan terhadap kesehatan terkait pula dengan ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan, obat dan peralatan kesehatan. Penggunaan obat generik dan obat tradisional cenderung meningkat, namun ketersediaan mutu dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu obat tradisional belum dikembangkan dengan baik meskipun potensi yang dimiliki cukup besar.

1. Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah 7,7 tahun. Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7 – 12 tahun 98,63 persen; usia 13 – 15 tahun 86,73 persen serta usia 16-18 tahun 55,46 persen. Sementara itu Angka Melek Huruf penduduk sebesar 86,28 persen.

Untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 121,88 persen dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 107,85 persen. Pada Tahun 2010 jumlah SD/MI sebanyak 228 Unit (MI 8 Unit) dengan jumlah murid sebanyak 41.229 siswa yang didukung oleh 2.440 guru. Ratio siswa/sekolah adalah 180,83 dan ratio siswa/guru adalah 16,89.

Untuk jenjang pendidikan SLTP/MTs, Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 93,68 persen dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 79,23 persen. Pada Tahun 2010 jumlah SLTP/MTs sebanyak 66 Unit (MTs 5 Unit) dengan jumlah murid sebanyak 13.623 siswa yang didukung oleh 1.249 guru. Ratio siswa/sekolah adalah 206,41 dan ratio siswa/guru adalah 10,91.

Selanjutnya untuk jenjang pendidikan SMU/SMK/MA, Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 77,23 persen dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 67,81 persen. Pada Tahun 2010 jumlah SMU/SMK/MA sebanyak 38 Unit dengan jumlah murid sebanyak 10.253 siswa yang didukung oleh 745 guru. Ratio siswa/sekolah adalah 269,82 dan ratio siswa/guru adalah 13,76.

Pada tahun 2010 di Kabupaten Tana Toraja terdapat 7 (tujuh) Perguruan Tinggi atau setingkatnya antara lain UKI Toraja, STAKN, STT Kibaid, Akper Lakipadada, Akbid Sinar Kasih, Akademi Pariwisata Dian Rana dan Akademi Teknik Pratama dengan jumlah mahasiswa sebanyak 3.972 serta didukung dengan 168 dosen.

Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara merata, berkualitas dan terjangkau yang ditunjukkan dengan masih tingginya penduduk buta aksara, rendahnya cakupan layanan pendidikan bagi anak usia dini, serta masih rendahnya partisipasi pendidikan terutama pada jenjang pendidikan menengah pertama sampai pendidikan tinggi dikarenakan sebahagian penduduk tidak dapat menjangkau biaya pendidikan yang dirasakan masih mahal.

Disamping itu fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama ke atas belum tersedia secara merata terutama di daerah terpencil/terisolir sehingga menyebabkan sulitnya anak peserta didik untuk mengakses layanan pendidikan. Sementara itu kualitas juga masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan pembangunan yang disebabkan antara lain belum meratanya tenaga pendidik baik kualitas maupun kuantitasnya, belum memadainya ketersediaan fasilitas belajar terutama buku pelajaran dan alat peraga pendidikan, biaya operasional yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses belajar mengajarsecara bermutu masih sangat rendah.

Partisipasi aktif penduduk dalam berbagai pembangunan tidak terlepas dari peranan pemudanya yang merupakan potensi yang besar sebagai sumber daya yang akan menjadi modal pembangunan jika kualitasnya baik tetapi sebaliknya akan menjadi beban pembangunan jika kualitasnya rendah. Masalah pembangunan kepemudaan dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang bekerja diberbagai bidang pembangunan, kurangnya semangat kewirausahaan serta masalah-masalah sosial seperti narkoba yang membawa dampak negatif terhadap kehidupan kemasyarakatan yang sangat rentan terhadap masalah disintegrasi, kurang tersedianya wacana-wacana yang dapat mengembangkan bakat dan minat pemuda dalam berkreasi dan berprestasi.

1. Pembangunan kehidupan beragama selama ini berkembang dengan baik ditandai dengan terpeliharanya hubungan yang harmonis antar dan inter umat beragama, saling menghargai kebebasan menjalankan ibadah menurut kepercayaan terutama pada pelaksanaan ritual keagamaan dan kegiatan-kegiatan keagamaan, meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan dan pemanfaatan sesuai dengan fungsinya. Pembangunan bidang keagamaan juga memberi andil cukup besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya peran serta tokoh-tokoh agama dan organisasi keagamaan dalam mendorong partisipasi dan tanggung jawab umat beragama terhadap pembangunan daerah dan bangsa.

Namun demikian, meskipun kehidupan keagamaan beragama berkembang kearah yang lebih baik, pembangunan keagamaan masih dihadapkan pada gejala negatif di tengah-tengah masyarakat yang masih memprihatinkan seperti perjudian, perilaku asusila, pengedaran dan pemakaian obat-obat terlarang yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Disamping itu perlu diwaspadai kerawanan dan ketegangan sosial yang setiap saat dapat melahirkan konflik antar umat beragama yang bersumber dari sentimen-sentimen agama yang diartikan secara sempit akibat lemahnya etika dan nilai-nilai ajaran agama.

1. Masalah kemiskinan tetap terlihat sebagai fenomena pedesaan karena sebahagian besar penduduk miskin bermukim di pedesaan. Meskipun upaya penanggulangannya telah dimulai sejak Pelita I dan berhasil diturunkan pada pertengahan tahun 90-an tetapi karena adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, mengakibatkan jumlah penduduk miskin semakin bertambah.

Berbagai faktor yang mengakibatkan kemiskinan disamping rendahnya akse terhadap sarana dan prasarana juga akibat terjadinya gejolak harga yang menyebabkan masyarakat kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar. Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan di berbagai bidang pembangunan, namun penanggulangannya masih bersifat parsial oleh karena masing-masing bidang pembangunan memandang permasalahan relatif sempit. Berkaitan dengan itu bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi yang harus dipecahkan dengan kebijakan dan program lintas bidang pembangunan.

Pada tahun 2010, dari 50.350 rumah tangga di Kabupaten Tana Toraja, yang tergolong rumah tangga miskin sebasar 42,96 persen dan sebahagian besar bermukim di pedesaan.

1. Kebudayaan Nasional merupakan pencerminan nilai-nilai kepribadian bangsa tidak terlepas dari keberadaan kebudayaan daerah, yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur suatu suku atau bangsa. Dalam kaitan itu, pembangunan bidang kebudayaan di Kabupaten Tana Toraja mengalami kemajuan terhadap pemahaman dan pelestarian keragaman budayadaerah yang mencarminkan cita, rasa dan karsa leluhur sekaligus menjadi sumber inspirasi dan toleransi dalam penyelesaian masalah serta mulai berkembangnya interaksi antar budaya untuk memperkaya khasanah budaya daerah atau bangsa namun perlu adanya pencegahan pengaruh luar atau asing yang negatif dan tidak sesuai dengan keperibadian bangsa. Pembinaan kesenian daerah juga mengalami kemajuan dengan berkembangnya sanggar-sanggar seni, demikian juga pembinaan bahasa daerah mengalami kemajuan dengan masuknya bahasa daerah sebagai kurikulum lokal pada sekolah dasar.
2. Komitmen pemerintah terhadap upaya untuk meningkatkan kesetaraan *gender* (kedudukan dan peranan kaum wanita) di berbagai bidang pembangunan. Namun demikian, berbagai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan masih terjadi diberbagai bidang pembangunan, karena nilai-nilai budaya tradisional yang berkembang dan berlaku pada berbagai tingkat sosial, salah satunya dalam kehidupan bidang politik yakni belum terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan masih kurangnya jumlah perempuan dibanding dengan laki-laki yang menjadi anggota legislatif. Pada tahun 2010, dari 30 anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, hanya terdapat 4 (empat) orang perempuan. Sementara itu pada lembaga eksekutif, dari 27 eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja hanya terdapat 3 (tiga) orang perempuan.

Meskipun organisasi perempuan yang ada merupakan potensi besar bagi terciptanya suatu jaringan kelembagaan yang akan mendukung pengarusutamaan gender ke dalam setiap tahapan dan proses pembangunan di segala bidang namun kualitas peran dan kemandiriannya masih perlu ditingkatkan dan didorong agar semakin mandiri dan berorientasi pada pemberdayaan perempuan melalui bentuk-bentuk kerjasama dengan instansi pemerintah dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan dan proses pembangunan di segala bidang.

* + 1. **Ekonomi**
1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 sebesar 6,27 persen yang artinya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yakni 8,18 persen. Dilihat dari struktur ekonomi dalam PDRB Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2010 masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 41,95 persen, menyusul sektor jasa sebesar 19,11 persen kemudian sektor perdaganhan, restaurant dan hotel sebesar 17,29 persen. Lambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja tersebut sangat dipengaruhi oleh krisis ekonomi.
2. Pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Tana Toraja baik dari segi konstribusi terhadap pembentukan PDRB Daerah maupun dari segi struktur penduduk menurut mata pencaharian. Akan tetapi nilai tambah produk pertanian dan pendapatan petani masih rendah, karena dikelola secara tradisional di karenakan belum ada perlakuak pasca panen serta belum ada adopsi teknologi khususnya teknologi tepat guna dalam proses produksi. Pada sisi lain, sumber daya manusia yang terlibat dalam sektor pertanian memiliki pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah dan memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi pasar, harga dan teknologi produksi.

Data tahun 2010 menunjukan bahwa luas sawah menurut luas panen di Kabupaten Tana Toraja adalah sekitar 18.713 Ha dengan produksi 97.359,94 ton. Dari sawah tadah hujan yang ada, hanya ditanami 1 (satu) kali setahun seluas 6.768 Ha merupakan potensi sumber daya jika ditanami dengan tanaman palawija seperti jagung, kacang tanah ataupun kedele, namun faktor penguasaan teknologi usaha tani palawija di lahan sawah yang dimiliki petani masih sangat rendah sehingga diperlukan upaya-upaya dalam bentuk percontohan. Untuk komoditas jagung dan kedele, luas panen dan produktifitasnya masing-masing 4.378 Ha dengan produksi 21.166,84 ton dan 25 Ha dengan produksi 105,07 ton. Demikian juga dengan ubi kayu dan ubi jalar yakni luas panen dan produktifitasnya masing-masing 463 Ha dengan produksi 5.335,32 ton dan luas panen 306 Ha dengan produksi 3.367,40 ton.

Sumber daya pertanian khususnya penyuluh pertanian, peranannya dalam membina dan mendampingi petani dan kelompok tani sangat lemah/kurang karena keterbatasan dana pada pemerintah kabupaten untuk menyediakan biaya operasional penyuluh serta kelembagaan penyuluh pertanian tidak mandiri karena hanya melekat pada badan ketahanan pangan dan penyuluhan sebagai kelompok fungsional sementara tugas pokok dan fungsi yang diemban adalah melayani petani disemua sektor pertanian pertanian dalam arti luas). Pada Tahun 2010 jumlah penyuluh pertanian sebanyak 96 orang, Penyuluh Peikanan sebanyak 52 orang, Penyuluh Kehutanan sebanyak 2 orang, Penyuluh THL-TB (Kontrak Pusat) sebanyak 35 orang dan Penyuluh Kontrak Daerah sebanyak 2 0rang. Balai penyuluh Pertanian sebanyak 19 unit yang tersebar di setiap kecamatan dan baru memiliki gedung BPP sebanyak 11 unit. Sementara itu jumlah kelompok tani pada tahun 2010 sebanyak 1.278 kelompok yang terdiri dari kelas pemula 913 kelompok, lanjut 240 kelompok, madya 125 kelompok, dan kelompok wanita tani sebanyak 176 kelompok serta Kelompok pemuda tani sebanyak 19 kelompok.

Meskipun produktivitas pertanian cenderung meningkat namun pendapatan petani dan kesejahteraannya masih sangat rendah. Kurangnya informasi dan permodalan yang disediakan selama ini tidak dapat diakses petani karena tingkat kepercayaan Bank terhadap petani lemah akibat pengalaman masa lalu yang banyak mengakibatkan tunggakan kredit yang cukup signifikan sehingga petani tidak dapat mengembangkan usahanya secara layak ekonomi. Selain itu penguasaan teknologi hasil pertanian kurang diminati petani karena memerlukan investasi dan kecendrungan penggunaan komoditi pertanian yang didatangkan dari luar seperti pakan ternak, sementara bahan baku pakan ternak dapat dihasilkan di Tana Toraja.

Konsumsi ternak khususnya kerbau dan babi dari tahun ke tahun semakin meningkat karena berkaitan dengan pesta adat Rambu Tuka’ dan Rambu Solo’. Populasi kedua jenis ternak tersebut berdasarkan data tahun 2010 adalah ternak kerbau sebanyak 27.093 ekor dan ternak babi sebanyak 253.726 ekor. Rendahnya populasi ternak kerbau dikarenakan populasi ternak kerbau betina produktif sangat kurang sehingga tingkat kelahiran sangat rendah, sedangkan ternak babi diusahakan dalam skala kecil dengan mutu intensifikasi yang rendah. Selain ternak kerbau dan babi yang dibudidayakan, masyarakat juga membudidayakan ternak sapi dan kambing dibeberapa wilayah serta kuda yang umumnya digunakan oleh masyarakat sebagai alat transportasi dan alat angkut di daerah terpencil/terisolir.

Pengembangan perikanan di Kabupaten Tana Toraja dititik berapkan pada budidaya air tawar dengan sistem mina padi ikan karper dan nila, bahkan pernah dicoba udang gala dan ikan patin yang hasilnya cukup menjanjikan. Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) yang menghasilkan benih ikan mas selain untuk kebutuhan dalam daerah juga dijual keluar daerah. Tingkat produktivitas dari areal usaha perikanan masih rendah jika dibandingkan dengan potensi dan areal yang dapat dikembangkan.

1. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting, tidak hanya menunjang perekonomian tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Pada tahun 2010, Kawasan hutan di Kabupaten Tana Toraja sekitar 112.762,02 Ha. Dari luas kawasan hutan tersebut, 20.154,79 Ha merupakan hutan produksi dan 92.607,23 Ha adalah hutan lindung. Kondisi vegetasi kawasan hutan tersebut di atas tidak seluruhnya berhutan tetapi masih terdapat lahan kritis di dalam kawasan hutan. Kerusakan hutan tersebut hampir terjadi di semua wilayah kecamatan yang disebabkan oleh kebakaran hutan, perambah hutan, penebangan liar dan peladang berpindah-pindah.

Kerusakan hutan tersebut sangat memprihatinkan karena berdampak pada ketidakseimbangan dan kerusakan ekosistem dalam tatanan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta dapat mengganggu kehidupan masyarakat, baik pada daerah hilir maupun daerah hulu. Hal ini dapat dilihat pada musim kemarau, debit air sangat menurun dan apabila musim hujan maka debit air sangat tinggi sehingga menimbulkan banjir pada daerah hilir sehingga perlu diatasi secara cepat agar sumber daya hutan tidak bertambah rusak sehingga daerah aliran sungai dapat bermanfaat secara optimal dan berkesinambungan. Kabupaten Tana Toraja merupakan hulu dari beberapa aliran sungai diantaranya Sungai Sa’dan. DAS Sa’dan telah dimanfaatkan untuk pengairan sawah di Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap. Selain kondisi fisik hutan yang kritis, kondisi masyarakat di sekitar kawasan hutan perlu ditingkatkan kesejahteraannya agar tekanan terhadap kawasan hutan dapat berkurang.

Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air terutama untuk air irigasi dan pengendalian banjir serta fasilitas publik lainnya masih belum memadai, sejalan dengan makin menurunnya daya dukung lingkungan sehingga sering kali bencana banjir menghambat kegiatan ekonomi dan menimbulkan kerusakan fasilitas publik dan pemukiman,

Kecendrungan kebutuhan air yang semakin meningkat, tetapi tidak diikuti dengan kemampuan penyediaan akan mendorong terjadinya benturan dalam pemanfaatan air terutama pada sumber air lintas wilayah. Untuk itu perlu pengaturan peran dan wewenang pihak-pihak yang berkepentingan dalam satu kesatuan sistem pengelolaan sumber daya air.

1. Perkebunan di Kabupaten Tana Toraja merupakan sektor unggulan terutama komoditas kopi. Namun permasalahan yang dihadapi dalam sektor perkebunan adalah rendahnya produktivitas masing-masing komodity serta mutu yang beleum memenuhi kriteria standarisasi pasar export. Pada tahun 2010, produksi kopi arabica sebesar 2.816 ton, produksi kopi robusta 997 ton, produksi kakao 2.200 ton, produksi cengkeh 104 ton dan produksi lada 27 ton. Tanaman kopi merupakan komoditas unggulan Kabupaten Tana Toraja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Tana Toraja yang sebahagian besar bergerak di bidang perkebunan kopi yang tersebar dibeberapa kecamatan, antara lain PT. Morante Jaya Rejeki di Kecamatan Makale, PT. Sulotco Jaya di Kecamatan Saluputti dan PT. Agrowati di Kecamatan Rantetayo.

Holtikultura di Kabupaten Tana Toraja memungkinkan untuk dilakukan pengembangan komoditi holtikultura khususnya tanaman spesifik dataran tinggi seperti markisa, tamarillo, manggis, durian dan sayur-sayuran

1. Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Tana Toraja untuk dikembangkan dan dikelola secara baik agar mampu memberikan lapangan pekerjaan dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Tana Toraja sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Indonesia Bagian Timur memiliki potensi pariwisata yang sangat besar diantaranya panorama alam yang sangat indah, iklim yang sangat sejuk serta nilai-nilai budaya yang unik dan menarik yang memang diminati wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. Pembangunan pariwisata dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah mengalami kemajuan dan perkembangan yang cukup menggembirakan ditandai dengan meningkatnya pemahaman keragaman budaya serta berkembangnya interaksi antar budaya. Namun disisi lain, dilihat dari konstribusinya terhadap pendapatan asli daerah belum memberikan konstribusi yang signifikan. Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2010 sebanyak 18.258 orang yang terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 5.627 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 12.631 orang. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya mencapai 5.603 wisatawan mancanegara dan 5.499 wisatawan nusantara. Guna menunjang pariwisata di Tana Toraja maka terdapat sejumlah akomodasi seperti hotel berbintang dan non bintang. Jumlah hotel berbintang sebanyak 3 unit dengan jumlah kamar yang tersedia sebanyak 122 kamar dengan 241 tempat tidur sedangkan non bintang/melati sebanyak 7 unit denga jumlah kamar yang tersedia sebanyak 103 kamar dengan 154 tempat tidur.

Kurangnya konstribusi dari sektor pariwisata disebabkan oleh karena objek daya tarik wisata yang dimiliki bersifat monoton, kegiatan promosi dan destinasi wisata tidak terencana dengan baik, koordinasi antar instansi lintas sektoral tidak optimal serta masih terbatasnya tenaga terampil yang dapat mengelola pariwisata secara baik dan terencana.

1. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar karena mencangkup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, dengan sasaran utama terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja. Pada tahun 2009 angkatan kerja di Kabupaten Tana Toraja sebanyak 212.207 orang, turun menjadi 104.208 pada tahun 2010 atau mengalami penurunan sebesar 50,89 persen. Dari segi tingkat pendidikan yang ditamatkan, angkatan kerja pada tahun 2010 sebesar 50.014 orang yang berpendidikan SD, 18.872 orang yang berpendidikan SLTP dan 35.142 yang berpendidikan SLTA keatas.

Partisipasi penduduk usia kerja dalam berbagai kegiatan ekonomi dapat dilihat pada tingkat partisipasi angkatan kerja. Pada Tahun 2009 tingkat partisipasi angkatan kerja di Tana Toraja sekitar 69,48 persen dan naik menjadi 73,48 persen pada tahun 2010. Sejalan dengan itu, lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian sekitar 71,85 persen dari jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2010, kemudian sektor Jasa sekitar 11,25 persen, sektor angkutan dan komunikasi sekitar 5,70 persen, sektor perdagangan sekitar 5,54 persen, sektor bangunan sekitar 3,26 persen serta sektor lainnya sekitar 2,4 persen.

Demikian juga halnya untuk pengangguran terbuka, pada tahun 2009 tingkat pengangguran terbuka sekitar 3,42 persen kemudian meningkat menjadi 7,78 persen pada tahun 2010. Oleh karena itu upaya pencegahan ketenagakerjaan memerlukan perhatian dan merupakan tantangan yang berat dihadapi, karena lambatnya/rendahnya pertumbuhan ekonomi sehingga tidak dapat mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja serta meningkatnya pengangguran usia muda yang seharusnya masih mengenyam bangku pendidikan.

1. Peranan sektor industri untuk mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah cukup besar apabila kegiatan sektor ini dapat berkembang, namun demikian hingga tahun 2010 perkembangan industri khususnya industri besar dan menengah di Tana Toraja belum ada. Bidang usaha industri yang cukup berkembang di Tana Toraja adalah industri kecil dan rumah tangga yang umumnya merupakan usaha keluarga dimana industri ini banyak menyentuh kehidupan masyarakat, dapat menciptakan lapangan kerja dan menunjang industri pariwisata. Jumlah perusahaan menurut kode industri di Kabupaten Tana Toraja berjumlah 129 unit dan sektor ini memberikan konstribusi terhadap pembentukan PDRB Tana Toraja pada tahun 2010 sebesar 10,31 persen.
2. Secara umum pembangunan perdagangan diyujukan untuk mendorong peningkatan pendapatan para produsen lokal, khususnya untuk melindungi kepentingan produsen komoditi pertanian yang sering kali memiliki posisi yang sangat lemah dalam transakti perdagangan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengembangkan usaha perdagangan dengan meningkatkan sarana dan prasarana baik diperkotaan, ibukota kecamatan maupun di pedesaan (pasar desa).

Aktivitas perdagangan yang tidak kalah penting adalah mencangkup pengadaan dan distribusi komodity bahan kebutuhan pokok untuk konsumsi setempat, yang umumnya dilakukan oleh swasta, selama ini lancar dan dapat dikendalikan. Selain itu aktifitas perdagangan yang lainnya meliputi perdagangan antar daerah untuk komoditi-komoditi pertanian/perkebunan.

* + 1. **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Pembangunan dibidang teknologi dan ilmu pengetahuan cukup berkembang dengan mendapat masukan dari berbagai hasil penelitian dan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mendukung pelaksanaan pembangunan disegala bidang.

* + 1. **Sarana dan Prasarana**
1. Perhubungan memegang peranan sangat penting terutama prasarana untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar daerah, antar perkotaan dan perdesaan terutama pada wilayah terpencil/terisolir. Prasarana jalan merupakan kebutuhan yang sangat vital karena aktivitas ekonomi, mobilitas penduduk, barang dan jasa hanya dapat berkembang jika ditunjang dengan sarana dan prasarana perhubungan khususnya prasarana jalan yang memadai. Untuk itu pembangunan jaringan jalan baik pemeliharaan maupun peningkatan dan perintisan untuk membuka isolasi wilayah yang terisolir/terpencil perlu diupayakan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pada tahun 2010, panjang jalan menurut pemerintahan yang berwenang di Kabupaten Tana Toraja 1.243 km yang terdiri atas 43 km jalan negara, 40 km jalan provinsi dan 1.160 km jalan kabupaten. Panjang jalan menurut jenis permukaan di Kabupaten Tana Toraja terdiri atas 290,90 km jalan aspal, 310,95 km jalan kerikil dan 546,95 km jalan tanah. Dari panjang jalan diatas, kondisinya masih memprihatinkan yakni sekitar 74,25 persen dalam keadaan rusak dan rusak berat. Dari kondisi prasarana jalan di atas menggambarkan bahwa disamping mempertahankan fungsi jalan dari jalan aspal melalui pemeliharaan secara periodik, juga masalah yang memerlukan perhatian besar adalah peningkatan jalan serta perintisan/pembukaan jalan untuk membuka keterisolasian wilayah agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Tingginya kerusakan prasarana jalan akan menambah waktu tempuh, biaya transportasi dan biaya operasional kendaraan sehingga berpengaruh pada aktivitas ekonomi, mobilitas penduduk, barang dan jasa.

Keterbatasan dana pemerintah kabupaten berdampak pada menurunnya kondisi prasarana jalan, sehingga tidak optimal memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu upaya pendanaan dari berbagai sumber pembiayaan serta memotiasi, menstimulasi dan memfasilitasi masyarakat dalam pembangunan prasarana jalan. Selain itu, penyediaan infrastruktur terkait dengan penggunaan sumber daya air terutama air irigasi masih memerlukan perhatian besar dalam mendukung peningkatan produksi pangan.

1. Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang tidak hanya menyangkut segi kuatitatif melainkan juga segi kualitas yang memungkinkan terselenggaranya perumahan sesuai dengan fungsinya sebagai tempat tinggal yang diperlukan manusia untuk memasyarakatkan diri.

Rumah yang sehat/layak yang mencerminkan kondisi kesehatan penduduk mempunyai luas lantai yang sesuai dengan banyaknya anggota keluarga. Salah satu kriteria rumah sehat yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan adalah luas lantai perkapita minimal 9 m2, sedangkan kriteria WHO minimal 10 m2 perkapita. Kondisi perumahan di Kabupaten Tana Toraja sebahaian besar menggunakan dinding kayu karena bahan bakunya banyak tersedia di daerah ini walaupun dari tahun ketahun semakin menurun, hal ini dibarengi dengan meningkatnya jumlah rumah yang menggunakan dinding tembok.

Keterbatasan dana Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk penyediaan kebutuhan perumahan, menyebabkan upaya pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat dipenuhi oleh masyarakat sendiri secara swadaya walaupun kemampuan serta daya beli masyarakat rendah.

Kondisi perumahan dan lingkungan tidak hanya dilihat secara fisik, tetapi juga dari aksesnya ke berbagai fasilitas seperti air bersih, jamban, listrik dan lain-lain. Fasilitas air bersih adalah sumber air bersih yang berasal dari air bersih perpipaan, sumur bor/sumur pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja sebagai satu-satunya BUMD yang mengelolah air bersih, terutama pada wilayah perkotaan khususnya Makale. Permasalahan yang dihadapi bahwa manajemen pengelolaan air bersih oleh PDAM memerlukan perhatian serius, karena sejak beroprasi kondisi keuangan belum pernah memperoleh keuntungan sementara kemampuan keuangan daerah sangat terbatas.

1. Pembangunan kelistrikan dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Konsumsi energi masyarakat Tana Toraja adalah menggunakan listrik dan bahan bakar minyak terutama di wilayah pedesaan yang belum dijangkau oleh jaringan listrik PLN. Keadaan pelayanan listrik tahun 2006 sebesar 18.350 Rumah tangga yang menikmati listrik PLN dan meningkat pada tahun 2010 menjadi 25.153 rumah tangga.

Selain energi listrik PLN yang digunakan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melalui APBD dan Yayasan Turbin mencoba mengembangkan sumber-sumber energi alternatif sesuai dengan potensi yang tersedia di lokasi dengan membangun Pembangkit Listrik Mikri Hidro (PLTMH) pada wilayah terpencil yang sangat sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN.

1. Penataan ruang dimaksudkan untuk pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan agar pendayagunaan sumber daya sesuai dengan peruntukannya, dan untuk mencagah adanya benturan penggunaan antar sektor dan antar kepentingan saat ini dengan kepentingan masa depan serta mencegah penggunaan ruang secara tidak terkendali dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat. Pemanfaatan ruang yang dilakukan selalu berdasarkan pada kesatuan wilayah yang ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat melalui berbagai penggunaan ruang terutama untuk keperluan pemukiman, pertanian dalam arti luas, perdagangan, industri, pariwisata, pertambangan serta prasarana pembangunan lainnya.

Namun demikian, pembangunan yang dilakukan saat ini masih sering dilakukan dengan tidak memperhatikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya atau fungsinya, serta tidak memperhatikan keberlanjutannya sehingga menurunkan kualitas sumber daya dan lingkungan, terjadinya konversi lahan produktif menjadi kawasan perdagangan dan pemukiman.

Terjadinya benturan pemanfaatan ruang antar sektor karena pembangunan yang dilakukan belum menggunakan rencana tata ruang sebagai acuan dan perangkat koordinasi pembangunan antar sektor/bidang pembangunan. Disamping itu, kurangnya informasi atas rencana tata ruang yang mudah diakses oleh masyarakat.

* + 1. **Politik**

Proses demokrasi yang berjalan selama ini memperhatikan antusiasme masyarakat berpolitik melalui organisasi politik cukup tinggi, walaupun masih tetap terlihat adanya hambatan terhadap kebebasan berekspresi dan berpartisipasi dalam proses demokrasi berupa masih longgarnya nilai-nilai kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan lemahnya tradisi dalam berorganisasi. Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembangnya kesadaran terhadap hak-hak sah masyarakat dalam kehidupan berpolitik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat untuk makin aktif berpartisipasi dalam urusan-urusan publik.

Keberadaan institusi-institusi baru demokrasi yang dalam pelaksanaan perannya memberikan optimisme terhadap penguatan demokratisasi. Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator merupakan suatu perkembangan positif yang perlu dipelihara dalam menjaga kebebasan dan keadilan proses pemilu yang demokratis. Keberhasilan pelaksanaan pemilihan langsung, aman dan demokratis merupakan modal awal yang penting bagi berkembangnya demokrasi pada masa yang akan datang. Kelemahan-kelemahan penyelenggaraan seperti persoalan ketidakpuasan politik di daerah, dapat terus dibenahi dengan tidak mengubah prinsip penyelenggaraan pemilu yang independen, bebas dan adil.

* + 1. **Hukum dan Aparatur**

Pembangunan di bidang hukum terutama untuk mendukung proses pembaharuan dan pranata hukum belum memberikan hasil yang memadai bagi perbaikan pelayanan hukum kepada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan aparatur negara belum memperhatikan kinerja yang optimal. Hal tersebut tercermin dari berbagai tindakan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk KKN yang dapat merugikan masyarakat. Kondisi demikian dapat menghambat dan memperlemah kemampuan aparatur negara dalam mengantisipasi perkembangan diberbagai bidang.

* + 1. **Sumber Daya Alam dan Lingkungan**
1. Sumber daya alam dan lingkungan hidup dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian, fungsi lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan dimasa yang akan datang, sehingga sumber daya alam dan lingkungan hidup senantiasa memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan.

Dengan melihat kondisi sumber daya alam dan lingkungan saat ini, apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara arif dan bijaksana dapat menimbulkan ancaman dimasa yang akan datang antara lain krisis pangan, air dan energi.

Dengan bertambahnya penduduk, menyebabkan kemampuan penyedia pangan semakin terbatas, karena meningkatnya konversi lahan persawahan dan lahan produktif lainnya sehingga produksi hasil pertanian semakin menurun. Bertambahnya kebutuhan lahan dan penggunaan fungsi untuk hal yang lain yang dapat mengencam keberadaan lahan sesuai dengan fungsinya dan dapat mengancam ketersiaan air.

Kabupaten Tana Toraja memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup besar yaitu DAS Sa’dan dengan Sub DAS Sa’dan Hulu (Tana Toraja – Enrekang) dan Sub DAS Masuppu’ (Tana Toraja – Polewali – Mamasa). Kerusakan hutan di Tana Toraja akan menimbulkan dampak terhadap kerusakan ekosistem dan DAS yang berhulu di Tana Toraja serta dapat menyebabkan menurunnya debit air untuk pengairan di Kabupaten Pinrang dan Sidrap serta PLTA Bakaru.

Meningkatnya pencemaran lingkungan dan pemukiman kumuh yang diakibatkan oleh pertambahan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, sementara kemampuan penyediaan fasilitas seperti persampahan dan drainase tidak dapat mengimbangi pertumbuhan kota karena keterbatasan kemampuan pemerintah kabupaten dalam penyediaan dana. Limbah hasil aktivitas perhotelan, restauran/rumah makan, rumah tangga dan limbah pasar yang terakumulasi dari hari kehari menjadi beban lingkungan di daerah ini sementara kapasitas tampung Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan sarana angkutan sangat terbatas. Demikian juga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara teknis belum memadai dan belum dikelola dengan baik sehingga sangat perlu mendapat perhatian serius pada masa yang akan datang. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida selama ini yang dijadikan bahan utama meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan juga perlu mendapat perhatian karena penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak penurunan kualitas lahan/tanah dan kualitas air. Selain itu keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga dihadapkan dengan adanya perubahan iklim akibat pemanasan global pada aktivitas kehidupan manusia.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sunber daya alam dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

* Data *fixed*  potensi sumber daya alam belum tercakup dengan baik.
* Masih terbatasnya tenaga terampil yang dapat mengelola SDA secara arif dan bijaksana.
* Masih terbatasnya kemampuan aparatur untuk mengimplementasikan hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam.
* Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan dan lestari.
* Kurangnya expose potensi sumber daya alam yang ada untuk dipromosikan.
1. Pembangunan di bidang pengelolaan pertanahan diarahkan pada terwujudnya penggunaan, penguasaan tanah yang adil dan terselenggaranya pelayanan administrasi pertanahan yang tertib dengan mengutamakan hak-hak masyarakat setempat. Masalah pertanahan dewasa ini telah berkembang menjadi masalah yang kompleks, seiring dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dimana masalah pertanahan berkaitan dengan penggunaan tanah, pemanfaatan, kepemilikan dan pengendalian serta perlindungan kepada masyarakat. Sementara itu pengalihan kepemilikan lahan pertanian sulit dikendalikan yang tampak dari semakin banyaknya lahan produktif yang berubah fungsi menjadi lahan pemukiman dan perdagangan.

Ditinjau dari segi pemanfaatannya, maka penguasaan tanah Di Tana Toraja dapat dibagi dalam dua golongan yaitu tanah/lahan yang dikuasasi oleh masyarakat dan tanah/lahan yang dikuasai oleh negara. Tanah yang dikuasai oleh masyarakat antara lain berupa tanah yang telah diwarisi secara turun temurun/tanah adat yang dikuasai oleh keluarga atau perorangan, yang mana tanah tersebut umumnya digunakan sebagai lahan pemukiman dan pertanian. Sementara itu, tanah yang dikuasai oleh negara adalah tanah/kawasan hutan dan tanah lainnya yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Selain itu terdapat pula lahan/tanah yang dikuasai oleh masyarakat atau organisasi/lembaga karena kebijakan pemerintah dengan izin prinsip seperti lahan untuk investor, lokasi transmigrasi dan lain-lain.

Dikaitkan dengan masalah status hukum kepemilikan tanah, masalah yang menonjol adalah cukup besarnya proporsi tanah yang belum bersertifikat, yang menimbulkan kemungkinan adanya kasus penguasaan tanah oleh pihak yang tidak berhak dan dapat mengurangi kekuatan hukum yang berakibat pada turunnya nilai ekonomis tanah. Hal tersebut di atas disebabkan oleh biaya administrasi sertifikat tanah masih dirasakan memberatkan bagi sebahagian besar penduduk, termasuk proses pengukuran tanah yang kurang cepat sehingga proses pengurusan sertifikat tanah masih dirasakan sulit oleh masyarakat.

1. Sumber daya mineral khusunya pertambangan merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan peranan yang besar dalam perekonomian daerah jika dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan peningkatan pendapatan masyarakat dan dapat membuka lapangan kerja. Potensi bahan tambang yang sudah dimanfaatkan masih sangat minim diantaranya tambang galian Golongan C (pasir kuarsa, kerikil dan batu) yang dilakukan dengan usaha pertambangan rakyat dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Selain tambang galian Golongan C tersebut, Tana Toraja memiliki potensi beberapa jenis tambang untuk bahan galian industri, antara lain Emas, Biji Tembaga, Biji Besi, Lempung, Kaolin, Barit, Batu Gamping, Marmer, Zeolit, Toseki, Tras, Feldpar, Mika, Granit, Syenit, Granodiorik dan Fosfat yang lokasinya tersebar di beberapa kecamatan. Namun demikian, hingga saat ini data akurat mengenai kapasitas cadangan masing-masing mineral tersebut belum ada.